

S
339.3
Winar
P
2007

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**



SKRIPSI

**PENGARUH PDRB SEKTOR EKONOMI UNGGULAN
TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



Oleh :

**WINALDO
(01033120047)**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi
2007**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

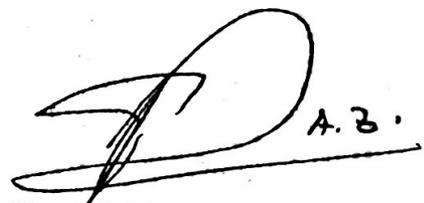
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : WINALDO
NIM : 01033120047
JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN
MATA KULIAH : KEUANGAN DAERAH
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PDRB SEKTOR EKONOMI
UNGGULAN TERHADAP PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN
MUSI BANYUASIN

PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI

Ketua

Tanggal 27 April 2007



Drs. M. Teguh, MSi
N I P. 131844032

Anggota

Tanggal 30 April 2007



Drs. H. M. Hibzon, MB
N I P. 131673861

Motto

Nikmati dan syukuri apapun yang sedang kau kerjakan dan apapun yang sedang kau miliki, selagi berusaha menggapai apa yang kau harapkan.

Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan hambanya.

Karya sederhana ini aku persembahkan
untuk Ayah dan Ibu'ku tercinta
Saudara-saudaraku
Masa lalu dan masa depanku

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang mana hanya atas rahmat dan hidayahnya penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk mengikuti ujian akhir dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Pelaksanaan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah termasuk Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan untuk lebih meningkatkan kemampuan terutama dalam bidang keuangan, sehingga akan lebih mandiri dalam membiayai kegiatan pembangunan dan tidak terus tergantung pada bantuan dari pusat. Penentuan prioritas pembangunan pada sektor ekonomi unggulan sangat diperlukan dalam usaha mendorong peningkatan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan. Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan tentunya akan menjadi penggerak pertumbuhan sektor lain sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan fenomena tersebut, maka melalui skripsi ini penulis mengungkapkan seberapa besar pengaruh sektor unggulan tersebut terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Tak ada gading yang tak retak, dan penulis menyadari akan keterbatasan daya penguasaan dan pengetahuan, sehingga penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis membutuhkan masukan dan sumbang saran dari semua pihak, dan tentunya semua kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan sangat terbuka.

Akhirnya, semoga karya tulis yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Palembang, Mei 2007

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah...

Dengan telah selesainya proses penulisan skripsi yang berarti telah berakhirnya juga status penulis sebagai mahasiswa di Universitas Sriwijaya ini, maka penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terkait dalam proses penyelesaian skripsi ini, serta semua pihak yang telah mengisi hari-hari penulis selama menjadi mahasiswa di Universitas Sriwijaya, antara lain :

1. Ayah dan Ibu'ku tercinta yang selalu memberikan kebebasan dan doa untuk keterbaikkanku.
2. Saudaraku tercinta, yuk Aan yang selalu memberikan motivasi dan Nandot yang belum pernah tahu dan belum pernah peduli.
3. Prof. Dr. Hj. Nurlina Tarmizi, Msi, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Drs. M. Teguh, MSi, selaku Dosen Pembimbing Skripsi I.
5. Drs. H. M. Hibzon. MB, selaku Dosen pembimbing skripsi II.
6. Drs. Harunnurasyid, M.Com, selaku Dosen Tamu Penguji
7. Dr. Taufiq Marwah, SE, MSi, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan.
8. Dr. Syamsurijal AK, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
9. Bapak dan Ibu dosen serta para asisten dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
10. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
11. Staf pengurus perpustakaan Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatra Selatan.
12. Staf pengurus perpustakaan Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
13. Kawan-kawan fakultas ekonomi, khususnya jurusan ekonomi pembangunan 2003 yang tidak mungkin dituliskan satu-persatu namun terbingkai indah di hati. kalel yg selalu haus dgn wanita, rudi & asep (kpn loe punya pacar), alam dan hari yang selalu membantu walaupun kadang terpaksa, serta wanita-wanita penggoda 2003.

14. Kawan seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini : rizky, sengeh, yadi, imam, serta bowik yang telah mendahului kami. Keep fighting...!!!
15. Laskar Indian yang telah mengukir semangat jingga yang tak akan pudar di cakrawala jiwa.
16. Lilis maniez atas pelangi kehidupan yang terlewati.
17. Kawan-kawan gila yang selalu tertawa : erik yg abstrak dgn sariawan didompet yg abadi (tp tetep play boy), acong yg ancur dgn segala kemalangannya dlm urusan hidup dan cinta, serta dua setan pengganggu bob & wiko. + 'MM' (translate-nya)
18. Anak-anak kost 1512 yang selalu ribut.
19. Dan semua pihak yang merasa terkait namun terlupakan.

Penulis akan selalu mengingat semua kebaikan dan keburukan yang diberikan, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan anugerahnya kepada kita semua.
Amin...

Palembang, Mei 2007

Penulis



DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
MOTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar belakang	1
1.2. Perumusan masalah	9
1.3. Tujuan penelitian	10
1.4. Manfaat penelitian	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Landasan teori	11
2.1.1. Konsep pembangunan daerah	11
2.1.2. Teori pertumbuhan dan perkembangan daerah	13
a. Teori pertumbuhan ekonomi wilayah neo klasik	13
b. Teori basis ekonomi (<i>Economic Base Theory</i>)	16

2.1.3. Pendapatan asli daerah	18
2.2. Penelitian terdahulu	28
2.3. Kerangka pemikiran	29
2.4. Hipotesis	31

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Ruang lingkup penelitian	32
3.2. Data dan sumber data	32
3.3. Teknik analisis	33
a. Identifikasi sektor unggulan	33
b. Analisis pengaruh sektor ekonomi unggulan terhadap peningkatan PAD Kabupaten Musi Banyuasin	35
3.4. Batasan variabel operasional	37

BAB IV. GAMBARAN UMUM

4.1. Kondisi Geografis	39
4.2. Keadaan Penduduk	40
4.3. Kondisi Perekonomian	43
4.4. Pendapatan Asli Daerah	57

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Identifikasi Sektor Ekonomi Unggulan di Kabupaten Musi Banyuasin	62
5.2. Pengaruh Sektor Ekonomi Unggulan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.....	65

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan 72

6.2. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA xvi

LAMPIRAN xviii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Propinsi Sumatra Selatan Periode 1996 – 2005	8
Tabel 4.1. Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin Periode 1996 sampai 2005	41
Tabel 4.2. Jumlah Penduduk, Luas Daerah, dan Rata-rata Kepadatan Penduduk Per Km ² Menurut Kecamatan Di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005.....	42
Tabel 4.3. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Musi Banyuasin Atas Dasar Harga Konstan 2000 Periode 1996 – 2005.....	44
Tabel 4.4. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Musi Banyuasin menurut lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Persentase) Periode 1996 – 2005.....	46
Tabel 4.5. Distribusi PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Menurut lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 Periode 1996 – 2005.....	55
Tabel 4.6. Pendapatan Regional Per kapita Kabupaten Musi Banyuasin Atas Dasar Harga Konstan 2000 Periode 1996 – 2005	57
Tabel 4.7. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Penerimaan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Periode 1996 – 2005.....	59
Tabel 5.1. Koefisien Location Quatient Sektor Ekonomi Di Kabupaten Musi Banyuasin.....	64
Tabel 5.2. Hasil Regresi Pengaruh Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.....	66
Tabel 5.3. Hasil Regresi Pengaruh Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap Peningkatan Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Pengaruh modal terhadap output nasional	16
Gambar 4.1. PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Migas dan Non Migas Atas Dasar Harga Konstan 2000 Periode 1996-2005	47
Gambar 4.2. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Migas dan Non Migas Atas Dasar Harga Konstan 2000 Periode 1996-2005	47
Gambar 4.3. Struktur Perekonomian Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005 dengan Migas	56

DAFTAR LAMPIRAN

1. PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 Periode 1996-2005	72
2. PDRB Propinsi Sumatra Selatan Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 Periode 1996-2005	73
3. Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 2005	
4. Hasil Regresi Pengaruh Sektor Ekonomi Unggulan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	74
5. Hasil Regresi Pengaruh Sektor Ekonomi Unggulan Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.....	76
6. Hasil Regresi Pengaruh Sektor Ekonomi Unggulan Terhadap Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.....	78
7. Hasil Regresi Pengaruh Sektor Ekonomi Unggulan Terhadap Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	80
8. Hasil Regresi Pengaruh Sektor Ekonomi Unggulan Terhadap Lain-lain PAD Kabupaten Musi Banyuasin yang sah	82

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul pengaruh sektor ekonomi unggulan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sektor ekonomi unggulan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait yaitu Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatra Selatan, dan berbagai literatur yang ada di samping jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan buku-buku teks yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kuantitatif yaitu perhitungan *Location Quotient* (LQ) untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi manakah yang menjadi unggulan di Kabupaten Musi Banyuasin, serta metode regresi sederhana untuk mengetahui seberapa besar pengaruh PDRB sektor ekonomi unggulan (independen) tersebut terhadap PAD Kabupaten Musi Banyuasin (dependen)..

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor ekonomi unggulan Kabupaten Musi Banyuasin. Selanjutnya berdasarkan hasil pengujian dan tes terlihat bahwa PDRB sektor pertambangan dan penggalian berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan PAD Kabupaten Musi Banyuasin.

ABSTRACT

The title of this research is about the based economical sector to the increasing of local income in Musi Banyuasin. The purpose of research is to know the based economical sector effect to local income in Musi Banyuasin.

The used data are secondary data which are collected from statistical center instance in South Sumatera, other literatur, journals and text books related in the research. The analysisist technic is Quantitative analysisist which use the Location Quotient for search the based economical sector and the simpel regression method to know how far the effect of based economic sector (independent) to local income (dependent) Musi Banyuasin is.

The result shows that mining and quarrying sector is the based sector in Musi Banyuasin. Based on the result and tes, it shows that GRDP of Mining sector has affected significantly to the increasing local revenue in Musi Banyuasin.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menganalisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara, karena pada dasarnya aktivitas ekonomi adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat (Susanti, dkk, 2000:23).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tiga dasawarsa ini hanya menekankan pada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) antara 5 sampai 7 persen atau lebih per tahun. Namun berdasarkan pengalaman tahun 1950-an dan 1960-an, orientasi pertumbuhan ekonomi tersebut ternyata tidak mampu memecahkan permasalahan pembangunan secara mendasar, sehingga terjadi perubahan definisi pertumbuhan ekonomi yaitu sebagai suatu proses yang menyebabkan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan negara (Arsyad, 2005: 12-13).

Indonesia sebagai negara berkembang melaksanakan pembangunan di segala bidang untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta untuk mengejar ketertinggalan dari negara maju. Pembangunan tidak hanya dilakukan secara nasional tetapi juga dilakukan daerah, karena keberhasilan pembangunan nasional tidak lepas dari peranan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerahnya.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan salah satu dari bagian pembangunan nasional yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Pelaksanaan pembangunan daerah bertujuan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah agar lebih stabil dan konsisten sehingga pendapatan daerah meningkat, pendapatan masyarakat meningkat dan kesempatan kerja yang luas serta dapat mengembangkan kemampuan dan potensi sumber daya yang dimiliki daerah (Adrian, 2005:1). Dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, kemandirian daerah terutama dalam hal pembiayaan makin diperlukan. Pemerintah daerah dituntut lebih berperan dalam menjalankan fungsinya untuk dapat menggali potensi sumber daya yang ada di daerah, terutama sumber-sumber keuangan daerah yang berasal dari daerah sendiri sebagai modal dasar guna memperkecil ketergantungan dana pada pemerintah pusat.

Keseriusan pemerintah dalam membangun daerah ini dibuktikan dengan adanya suatu sistem pemerintahan yang dikenal dengan istilah Otonomi daerah. Untuk mendukung hal itu pemerintah mengeluarkan Undang-undang 22 Nomor

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang No.32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. Undang-undang tersebut merupakan landasan bagi daerah untuk membangun daerahnya secara mandiri dengan lebih mengandalkan kemampuan dan potensi yang dimiliki daerah. Undang-undang ini juga memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah (*local discretion*) untuk merancang berbagai program pembangunan yang sesuai dengan keinginan masyarakat setempat (Aklil, 2003:1).

Sejak Otonomi Daerah tersebut diberlakukan, peran pemerintah daerah dalam mengelola rumah tangganya sendiri semakin besar. Tuntutan untuk mampu membiayai urusan rumah tangga tersebut menimbulkan konsekuensi bahwa pemerintah daerah beserta perangkatnya harus bekerja keras agar mampu menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan daerah untuk pelayanan terhadap masyarakat.

Upaya pembangunan ekonomi daerah yang lebih tepat sekarang ini adalah dengan memberdayakan potensi dan kemampuan daerah itu sendiri. Konsep pertumbuhan sektor dan wilayah memungkinkan terjadinya keterkaitan antara wilayah dan daerah pengembangan. Untuk menerapkan konsep dan kebijakan tersebut, maka setiap daerah harus mampu mengidentifikasi sektor unggulan yang selanjutnya dapat menjamin peningkatan aktivitas ekonomi dengan menetapkan skala

prioritas guna peningkatan jumlah dan nilai tambah masing-masing sektor yang telah diidentifikasi (Aripanca, 2003:4)

Salah satu indikator kemajuan perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Bruto (PDRB). PDRB memperlihatkan besarnya produksi yang telah diciptakan oleh masing-masing sektor ekonomi pada tahun tertentu. Berkembangnya produksi dapat membawa dampak ganda pada kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya di daerah sehingga dapat meningkatkan PDRB dan akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat daerah.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah sangat terkait dengan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Rencana pembangunan daerah tersebut dilaksanakan berdasarkan identifikasi terhadap wilayah perencanaan dan karakteristik wilayah. Karakteristik wilayah perencanaan meliputi berbagai permasalahan dan potensi yang dimiliki daerah sehingga perencanaan pembangunan suatu daerah diarahkan untuk mengelola sumber daya daerah agar dapat menunjang pembangunan ekonomi daerah tersebut.

Besar kecilnya proporsi rencana pembangunan daerah tiap tahun dapat diketahui melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Peran pemerintah daerah dalam menyusun APBD tidak terlepas dari pengaruh gejolak ekonomi dan politik yang terjadi. Pemerintah menjadi motor utama dalam menggerakkan perekonomian agar tetap stabil atau bahkan mengalami pertumbuhan. Namun, upaya pemerintah daerah untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat serta melakukan pembangunan daerah harus tetap terjaga.

Sumber terbesar dari APBD idealnya adalah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besar-kecilnya PAD sangat dipengaruhi oleh sedikit banyaknya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi beserta masyarakat di daerah (Taufiq dan Kosasi, 2003:18). Meningkatnya kegiatan ekonomi akan membawa dampak pada peningkatan penyediaan dan layanan terhadap barang-barang dan jasa-jasa publik, sehingga kebutuhan dan daya beli masyarakat akan meningkat pula. Pemerintah dalam hal ini akan mengambil manfaat dari aktivitas tersebut berupa penerimaan pajak, retribusi jasa publik, yang merupakan sumber penerimaan PAD.

PAD merupakan salah satu sumber penerimaan yang harus selalu dipacu pertumbuhannya, yang tentunya harus ditindaklanjuti dengan memberikan kompensasi berupa pelayanan yang baik dan perbaikan fasilitas umum bagi masyarakat. Kenaikan jumlah PAD akan sangat berperan dalam rencana peningkatan kemandirian pemerintah daerah dan propinsi. Selanjutnya pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan dalam melakukan kegiatan investasi di mana pertumbuhan investasi tersebut diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi peningkatan perekonomian regional, yang nantinya secara tidak langsung akan dapat membantu meningkatkan PAD.

Pendapatan Asli Daerah dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan Pendapatan Asli Daerah kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berarti semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Rendahnya PAD dalam struktur penerimaan daerah disebabkan sumber-sumber yang

masuk dalam kategori PAD umumnya bukan sumber potensial bagi daerah. Sumber-sumber potensial yang dimiliki daerah sudah diambil oleh pemerintah pusat sebagai penerimaan pusat, sehingga yang tersisa di daerah hanya sumber-sumber yang kurang potensial. Selain itu rendahnya PAD disebabkan pula oleh belum intensifnya pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah (Munawar, 2002: 64).

Besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh potensi ekonomi yang dimiliki masing-masing daerah. Jika potensi ekonomi yang dimiliki suatu daerah tersebut semakin besar maka potensi pendapatan asli daerah di daerah tersebut juga semakin besar. Oleh sebab itu, daerah dituntut untuk mencari sumber-sumber dana yang dapat dijadikan pemasukan keuangan daerah. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu daerah Tingkat II di wilayah Propinsi Sumatra Selatan yang memiliki potensi sumber daya alam. Potensi sumber daya alam tersebut dapat berguna dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi bila dikelola dengan baik yang akhirnya diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin sangat ditentukan oleh pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang ada di Kabupaten tersebut, oleh karena itu pengetahuan dan penggalian tentang sektor ekonomi yang dapat dijadikan sebagai sektor unggulan sangat diperlukan. Selain diharapkan dapat berperan sebagai lokomotif penggerak sektor-sektor lainnya, pengetahuan mengenai sektor unggulan tersebut diperlukan untuk memperkirakan bagaimana peranannya dalam

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten MUBA guna membiayai pembangunan untuk mencapai target ekonomi yang ditetapkan. Penentuan prioritas pembangunan sangat diperlukan dalam usaha mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Syafrizal, 1997:35).

Sektor ekonomi unggulan memiliki peranan yang besar dalam perekonomian. Sektor ini dapat memenuhi permintaan yang ada di daerah dan dapat mengekspor ke daerah lain. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin harus memprioritaskan pembangunan pada sektor ekonomi unggulan tersebut. Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan akan membawa dampak pada peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan ini dapat dilihat dari perkembangan PDRB sektor tersebut. Jika PDRB sektor tersebut meningkat maka Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dapat mengambil manfaat melalui pemungutan pajak dan retribusi. Semakin tingginya pertumbuhan sektor ini maka akan semakin banyak objek dan subjek pajak yang dapat dikenakan oleh pemerintah. Selain itu, dengan meningkatnya PDRB berarti pengelolaan kekayaan daerah meningkat dan kegiatan perusahaan daerah milik Kabupaten Musi Banyuasin juga ikut meningkat, sehingga laba yang dihasilkan akan meningkat. Sumber-sumber pendapatan asli daerah tersebut haruslah di kelola dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sehingga akan meningkatkan kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan melalui pendapatan asli daerah.

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah pada kabupaten/kota yang ada di Propinsi Sumatra Selatan dapat di lihat pada tabel 1.1. di mana terlihat perbandingan

masing-masing kabupaten/kota dalam mengelola sumber keuangan yang berasal dari daerahnya sendiri. Kabupaten Lahat, Muara Enim, Ogan Komering Ulu, Musi Banyuasin, dan Kota Palembang merupakan daerah yang memiliki tingkat pendapatan asli daerah yang tinggi dibanding kabupaten/kota lain yang ada di Propinsi Sumatera Selatan.

Tabel 1.1.
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota
Di Propinsi Sumatera Selatan Periode 1996 – 2005
(Ribu Rupiah)

Tahun	Lahat	%	M.Enim	%	OKU	%	PLG	%	Muba	%
1996/1997	2.380.023	-	3.347.380	-	2.379.950	-	15.376.258	-	2.321.845	-
1997/1998	3.101.742	30,32	6.124.119	82,95	2.434.905	2,31	16.771.763	9,08	2.908.607	25,27
1998/1999	3.551.855	14,51	5.601.300	-8,54	4.936.716	102,75	18.034.490	7,53	4.523.496	55,52
1999/2000	2.979.042	-16,13	6.661.736	18,93	3.978.441	-19,41	19.768.727	9,62	4.875.245	7,77
2000	3.285.018	10,27	8.220.784	23,40	4.569.206	14,85	20.386.806	3,13	4.272.752	-12,35
2001	6.039.567	83,85	20.024.268	143,58	9.235.421	102,12	38.501.298	88,85	8.826.893	106,59
2002	7.363.575	21,92	16.512.278	-17,54	8.312.547	-9,99	36.037.251	-6,4	27.911.183	216,21
2003	0.138.490	37,68	27.078.417	63,99	16.853.725	102,75	57.496.301	59,55	17.312.238	-37,97
2004	4.325.901	41,30	27.901.744	3,04	17.151.245	1,77	76.137.954	32,42	9.491.418	-45,18
2005	9.309.075	34,78	33.494.774	20,05	12.116.377	-29,36	92.504.030	21,5	13.750.939	44,88
Rata-rata		28,72		36,65		29,75		25,03		40,08

Sumber : Statistik Keuangan Kabupaten/Kota Di Indonesia 1996 - 2005

Bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain seperti Kabupaten Muara Enim dan Kota Palembang, memang tingkat Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin masih relatif rendah. Pada tahun 2005 misalnya, penerimaan PAD Kabupaten Muara Enim mencapai Rp. 33.494.774 Ribu dan Kota Palembang mencapai Rp. 92.504.030 Ribu, sedangkan penerimaan PAD Kabupaten Musi Banyuasin hanya mencapai Rp. 13.750.939 Ribu. Tetapi bila dilihat dari tingkat rata – rata pertumbuhan selama periode 1996 – 2005 tingkat pertumbuhan penerimaan

PAD Kabupaten Musi Banyuasin lebih besar dibandingkan dengan kabupaten/Kota lainnya yaitu sebesar 40,18 %. Kota Palembang yang merupakan pusat perekonomian di Propinsi Sumatra Selatan yang seharusnya memiliki sumber potensial dalam peningkatan penerimaan PAD, namun tingkat rata-rata pertumbuhan penerimaan PAD-nya selama periode 1996 – 2005 hanya mencapai 25,03 persen. Begitu juga Kabupaten Lahat hanya sebesar 28,72, Kabupaten Muara Enim sebesar 36,65 %, dan Kabupaten OKU sebesar 29,75.

Diberlakukannya sistem otonomi daerah di tahun 2001 berpengaruh sangat signifikan terhadap peningkatan penerimaan PAD Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu sebesar 106,59 % di tahun 2001 dan bahkan pada tahun 2002 meningkat sebesar 216,21 %. Sementara penerimaan PAD Kota Palembang hanya meningkat sebesar 88,85 % di tahun 2001, dan sebaliknya mengalami penurunan di tahun 2002 yaitu sebesar -6,4.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang dibahas adalah “seberapa besar pengaruh PDRB sektor ekonomi unggulan Kabupaten Musi Banyuasin terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin?”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sektor ekonomi mana yang menjadi sektor unggulan Kabupaten Musi Banyuasin dan seberapa besar pengaruh PDRB sektor ekonomi unggulan tersebut terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kabupaten Musi Banyuasin.

1.4. Manfaat penelitian

- a. Manfaat akademis, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah didapat serta mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari guna mendukung analisis pada penulisan makalah.
- b. Manfaat operasional, dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam memutuskan kebijakan-kebijakan mengenai prioritas pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki sebagai sumber pendanaan guna meningkatkan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, H. 2005. *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah*. Penerbit Graha Ilmu
- Adriana, Nazri. 2005. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Selatan*. Skripsi. Inderalaya; Fakultas Ekonomi. Universitas Sriwijaya.
- Aklil, Maulana. 2003. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten OKI*. Tesis. Palembang. Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya..
- Aripanca, Shopyan. 2003. *analisis Sektor-sektor Unggulan di Kabupaten OKI*. Tesis. Palembang. Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
- Arsyad, Lincoln. 2005. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: PBF. Universitas Gajah Mada.
- Basri, Faisal. 1997. *Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI*. Jakarta. Erlangga.
- Ganda, Christian, Hosea. 2005. *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten OKI*. Skripsi. Inderalaya; Fakultas Ekonomi. Universitas Sriwijaya.
- Hendra, Suryadi. 2004. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muara Enim*. Tesis. Palembang. Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
- Jhingan, M.L. 2004. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Kesumah, Aning. 2006. *Pengaruh Pendapatan Per Kapita dan Tingkat Pendidikan Aparat Pengelola Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang*. Skripsi. Inderalaya. Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
- Kuncoro, Mudrajad. 1997. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Munawar. 2002. *Pendapatan Asli Daerah dalam Otonomi Daerah*. Lintas Ekonomi. Malang. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

- Nachrowi, D. Nachrowi, MSc., MPhil., AppSc., PhD. Dan Usman, Hardius, SSI., MSi. 2006. *Ekonometrika, Pendekatan Populer dan Praktis Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Siahaan, Maritoh P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Syafrizal, 1997. *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*. Prisma LP3ES, No.3 Tahun XXVI.
- Sukirno, Sadono. 1982. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: LPFEUI dan Bima Grafika.
- Suparmoko. 2001. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. BPFE. Yogyakarta
- Susanti. H., Moh. Iksan dan Widyanti. 2000. *Indikator-indikator Makro Ekonomi*, Edisi Kedua. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Taufiq dan M.Kosasi Zen. 2003. *Pengaruh Potensi Ekonomi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Palembang. Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
- Tarigan, Robinson. Drs. M.R.P.. 2003. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Penerbit Bumi Aksara.
- Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
- Widodo, Tri, SE, M.EC. Dev. 2006. *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. UPP STIM YKPN.
- Zahari. M. MS. 2001. *Analisis Pendapatan Asli Daerah dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Jambi*. Tesis. Palembang. Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
- Badan Pusat Statistik. *PDRB Propinsi Sumatra Selatan*, Edisi 1996 - 2005
- Badan Pusat Statistik. *PDRB Kabupaten Musi Banyuasin*, Edisi 1996 – 2005
- Badan Pusat Statistik. *Musi Banyuasin Dalam Angka*, Edisi 1996 – 2005
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Keuangan Kab/Kota Di Indonesia*. 1996 - 2005